

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota merupakan pusat kegiatan dan permukiman penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta sebagai suatu kawasan permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Menurut Sadyahutomo (dalam Indriani, Yuvita: 2013), kota adalah daerah terbangun yang memiliki jumlah penduduk dan intensitas penggunaan ruang yang cenderung tinggi sehingga kota senantiasa menjadi pusat aktivitas bagi penduduk dan daerah sekitarnya. Akan tetapi, tanpa disadari intensitas jumlah penduduk, penggunaan lahan serta aktivitas yang beragam menimbulkan permasalahan bagi lingkungan perkotaan serta permasalahan terhadap kondisi sosial bagi masyarakat diperkotaan itu sendiri.

Sebuah pemahaman dasar yang menjelaskan bahwa kondisi kota juga dapat menimbulkan permasalahan terhadap kondisi sosial yaitu bahwa kota biasanya dikarakteristikkan oleh adanya populasi yang lebih padat, sehingga mendorong timbulnya guna lahan yang beragam yang selanjutnya menjadi pemicu adanya jaringan transportasi yang kompleks. Kemudian guna lahan dan jaringan transportasi mempengaruhi lingkungan binaan terbentuk dan pada akhirnya menjadi ruang bagi aktivitas publik yang ditinggali oleh populasi antara lain manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi sosial baik dengan keluarga, teman, hingga pada rekan kerja. Jadi, untuk itu suatu ruang kota haruslah memiliki ruang publik yang cukup untuk memelihara interaksi antara penghuninya tersebut.

Pada tahun 2015, juga bertepatan dengan peringatan Hari Habitat Dunia melalui organisasi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) yang membidangi tentang permukiman yaitu “UN-Habitat” mengangkat tema *Public Space For All* atau **Ruang Publik Untuk Semua** dengan tujuan untuk mendorong upaya untuk menyediakan ruang publik yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat.

Menurut Siahaan (dalam Buletin Tata Ruang Edisi Juli-Agustus: 2010), karakteristik ruang publik sebagai tempat interaksi masyarakat yang sangat penting

dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kawasan perkotaan dan yang secara spasial didefinisikan sebagai tempat dimana setiap orang memiliki hak untuk memasukinya tanpa harus membayar uang masuk atau uang lainnya. Selain itu juga didalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang publik dapat berupa ruang terbuka hijau (RTH) publik atau ruang terbuka non hijau (RTNH) publik yang secara institusional harus disediakan oleh pemerintah di dalam peruntukan lahan di kota-kota di Indonesia.

Secara administrasi saat ini Provinsi Sumatera Barat terbagi atas 7 administrasi kota dan 12 administrasi kabupaten. Di 7 kota di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Kota Sawahlunto, secara keseluruhan telah memenuhi sarana dan prasarana perkotaan yang memadai untuk menunjang berbagai aktivitas masyarakat didalamnya misalnya jaringan transportasi darat berupa jalan, pusat perdagangan dan jasa berupa pasar, pemenuhan jaringan air bersih, sanitasi lingkungan dan lain sebagainya. Tidak ketinggalan juga dengan pemenuhan beberapa ruang publik seperti taman dan berbagai monumen yang juga disediakan untuk fungsi estetika, interaksi masyarakat, rekreasi atau sebagai ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau bila mengacu pada amanat Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengharuskan pemerintah untuk menyediakannya. Adapun beberapa ruang publik yang tersedia, tersebar pada suatu kawasan kota misalnya pada pusat kota yang menjadi kawasan pusat perdagangan dan jasa dan kawasan pusat perkantoran.

Dari beberapa ruang publik yang telah tersedia, berdasarkan hasil pengamatan awal atau survei pendahuluan pada 7 kota tersebut, pemanfaatan ruang publiknya dianggap sudah efektif karena telah dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, misalnya banyak dikunjungi masyarakat sebagai tempat untuk berkumpul dengan teman dan kelompok, beristirahat, tempat untuk mengekspresikan ide dan gagasan, serta tempat untuk berjualan jajanan kecil-kecilan yang ditawarkan kepada pengunjung yang datang. Sehingga bila ditarik kesimpulanya maka, dari beberapa ruang publik tersebut telah berhasil berperan sebagai wadah yang telah mampu menyediakan lingkungan kondusif bagi terpenuhinya syarat interaksi yaitu memberi peluang terjadinya kontak dan komunikasi sosial. Sebab pada akhirnya, keberadaan interaksi sosial melalui terbentuknya kelompok pengguna luar, intensifnya penggunaan ruang

dan adanya aktivitas yang beragam dapat menjelaskan bagaimana suatu ruang publik memberikan rasa nyaman dan bermakna bagi masyarakat.

Mengacu pada kondisi tersebut, pada skala provinsi saat ini belum ada suatu informasi terukur yang menggambarkan keberhasilan atau keefektifan suatu ruang publik pada setiap kota dalam mewujudkan terjadinya interaksi sosial bagi masyarakat yang ada didalamnya dari 7 administrasi kota tersebut, sebab menurut anggapan bahwa suatu ruang publik sebagai suatu tolak ukur peringkat kualitas kawasan perkotaan.

Menurut Dermawan (2003) suatu ruang publik ditandai dengan 3 kriteria antara yaitu bermakna, responsif dan demokratis. Bermakna, artinya suatu ruang publik dapat memberikan makna atau arti bagi masyarakat setempat secara individual maupun kelompok. Responsif, artinya tanggap terhadap semua keinginan pengguna dan dapat mengakomodir kegiatan yang ada pada ruang publik tersebut. Demokratis memiliki arti bahwa suatu ruang publik dapat menerima kehadiran berbagai lapisan masyarakat dengan bebas tanpa ada diskriminasi.

Namun dari beberapa pengertian ruang publik diatas, ruang publik yang baik harus dapat berfungsi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkumpul, berinteraksi, dan beraktivitas dengan aman dan nyaman. Tanpa adanya aktivitas dan interaksi sosial dari manusia didalamnya, maka suatu ruang publik telah gagal mengemban misinya (Siahaan, 2010). Menurut Setiawan (dalam Indriani, Yuvita: 2013), ruang publik yang baik harus dapat dilihat dari tingkat pemanfaatan oleh masyarakat baik dari jenis aktivitas maupun jumlah pengguna tamannya. Metode *Good Public Space Index (GPSI)* adalah sebuah metode yang menjelaskan bagaimana suatu ruang publik bermakna bagi masyarakat dengan mempergunakan aktivitas sosial serta karakteristik pengguna ruang luar sebagai pendekatan (Perlindungan, Johannes: 2013).

Berhubungan dengan pemilihan metode *Good Public Space Index (GPSI)* dalam penelitian ini selain alasan yang bersifat ilmiah dan teoritis, bila dikaitkan dengan hal-hal ilmiah lainnya yang bertema diluar fokus penelitian ini, untuk penulisan ilmiah baik itu penelitian yang dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah, terdapat beberapa penelitian yang dilakukan dengan cara mengindekskan suatu hal yang ingin dinilai untuk melihat tingkatan pencapaian atau keberhasilan suatu fokus amatan dengan metode yang semacam ini. Seperti halnya penggunaan metode indeks kota layak huni, indeks pembangunan desa yang dilakukan untuk melihat klasifikasi kemajuan

pembangunan pada desa-desa serta juga seperti indeks kota cerdas dan banyak yang lainnya. Tentunya dengan banyak cara-cara tersebut pasti didukung dengan variabel penelitiannya masing-masing.

Kembali lagi pada bagian GPSI, berdasarkan penjelasan diatas maka dari itulah yang akan digunakan sebagai dasar pertanyaan utama untuk melakukan studi ini yaitu menilai seberapa efektifkah ruang publik yang tersedia menjadi wadah yang telah mampu menyediakan lingkungan kondusif bagi terpenuhinya syarat interaksi yaitu memberi peluang terjadinya kontak dan komunikasi sosial ? Serta tingkat keefektifannya bila dibandingkan dengan ruang publik lain yang berada pada pusat-pusat 7 kota di Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat diketahuinya tolak ukur dalam menyimpulkan indeks keberhasilan suatu ruang publik bermakna bagi masyarakat apakah memang ruang publik yang telah dinilai benar-benar mencirikan sifat ruang publik yang demokratis, responsif dan juga bermakna bagi penggunaanya.

1.2 Rumusan Masalah

Dari beberapa penjelasan pada latar belakang diatas, maka ditemukan rumusan masalah yang akan menjadi fokus amatan dan analisis pada penelitian ini anantara lain seberapa besarkah tingkat keberhasilan atau keefektifan ruang publik pada pusat kota-kota di Provinsi Sumatera Barat dalam hal menjamin terpenuhinya syarat interaksi bagi masyarakat didalamnya dengan menggunakan metode *Good Public Space Index (GPSI)*.

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari studi ini adalah **mengeksplorasi dan mengukur tingkat efektifitas ruang publik pada pusat kota-kota di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan metode *Good Public Space Index (GPSI)*.**

1.3.2 Sasaran

Adapun sasaran dari studi ini adalah :

- ❖ Mengidentifikasi kawasan ruang publik yang akan menjadi objek amatan/ studi berdasarkan kesamaan sifat letak dan karakteristik pemanfaatan ruang disekitarnya di 7 pusat kota-kota Provinsi Sumatera Barat .

- ❖ Memetakan dan mendelineasi kawasan ruang publik yang telah dipilih sebagai objek amatan.
- ❖ Mengkaji tingkat efektifitas ruang publik pada 7 kota di Provinsi Sumatera Barat dengan metode analisis *Good Public Space Index (GPSI)*.
- ❖ Merumuskan atau menginterpretasikan tingkat efektifitas ruang publik tersebut.

1.4 Manfaat Studi

Manfaat dari studi ini adalah tersedianya referensi dan masukan yang terukur yang dapat menjelaskan tentang tingkat atau indeks keefektifan ruang publik yang ada di kota-kota di Provinsi Sumatera Barat yang bermakna bagi masyarakat dalam hal menjamin terpenuhinya syarat interaksi yang terjadi didalamnya serta mendorong terciptanya pengembangan ruang publik yang mampu meningkatkan kualitas perkotaan.

1.5 Ruang Lingkup

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Secara makro, yang menjadi wilayah studi yaitu Provinsi Sumatera Barat yang secara geografis terletak antara $0^{\circ}54'$ LU – $3^{\circ}30'$ LS dan $98^{\circ}36'$ BT – $101^{\circ}53'$ BT dan dilalui garis khatulistiwa (garis lintang nol derajat/ garis equator). Provinsi Sumatera Barat memiliki luas daratan $\pm 42.297,30 \text{ km}^2$ dan luas perairan (laut) $\pm 52.882,42 \text{ km}^2$ yang terbagi dalam 12 wilayah administrasi kabupaten serta 7 wilayah administrasi kota. Provinsi Sumatera Barat berbatasan langsung dengan :

- ❖ Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara,
- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu,
- ❖ Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi, dan
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Sedangkan secara mikro yang menjadi kawasan studi 7 wilayah administrasi kota di Provinsi Sumatera Barat antara lain Kota Bukittinggi, Padang, Padang Panjang, Pariaman, Payakumbuh, Sawahlunto dan Solok.

Tabel 1.1**Daftar Administrasi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat**

No	Nama Wilayah	Jumlah Kecamatan	Luas Wilayah	
			Ha	%
A	Kabupaten			
1	Limapuluh Kota	13	335.430	7,93
2	Agam	16	223.230	5,28
3	Dharmasraya	4	296.113	7,00
4	Kepulauan Mentawai	10	601.135	14,21
5	Padang Pariaman	17	132.879	3,14
6	Pasaman	12	444.763	10,52
7	Pasaman Barat	11	338.777	8,01
8	Pesisir Selatan	12	579.495	13,70
9	Sijunjung	8	313.080	7,40
10	Solok	14	373.800	8,84
11	Solok Selatan	7	334.620	7,91
12	Tanah Datar	14	133.600	3,16
B	Kota			
1	Bukittinggi	3	2.524	0,06
2	Padang	11	69.496	1,64
3	Padang Panjang	2	2.300	0,05
4	Pariaman	3	7.336	0,17
5	Payakumbuh	3	8.043	0,19
6	Sawahlunto	4	27.345	0,65
7	Solok	2	5.764	0,14
Sumatera Barat		166	4.229.730	100,00

Sumber : Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-20130

1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam studi ini adalah menilai/ mengkaji tingkat keberhasilan yang selanjutnya disebut sebagai efektifitas dari pada ruang publik pada pusat kota-kota di Provinsi Sumatera Barat menggunakan metode GPSI.

❖ Batasan Studi

- a) Batasan didalam studi ini dibatasi oleh faktor lokasi dan juga fokus penelitiannya. Untuk lokasi kawasan studi yang dipilih yaitu pada kawasan ruang publik pada masing-masing pusat kota diambil 1 kawasan ruang publik yang dianggap memiliki kesamaan letak dan karakteristik pemanfaatan ruang kawasan disekitarnya yaitu berada pada pusat kota atau dekat, dominan dengan penggunaan lahan perdagangan dan jasa dikawasan sekitarnya.
- b) Kemudian untuk fokus kajian difokuskan pada amatan pendekatan terhadap karakteristik pengguna ruang publik tersebut dan karakteristik aktivitasnya. Sehingga dengan fokus tersebut maka, dipakailah suatu alat atau metode analisis *Good Public Space Index* (GPSI) yang secara jelas mampu mengkaji tentang rumusan yang menjadi masalah dalam studi ini yang keluaranya sesuai dengan yang diharapkan pada manfaat studi. Pertimbangan ini didasarkan pada 3 poin antara lain, ruang publik terpilih berada pada pusat kota (skala dalam kota), memiliki karakteristik penggunaan lahan (eksisting) yang mirip dikawasan sekitarnya yaitu objek ruang publik terpilih terletak pada lokasi yang penggunaan lahan sekitarnya yaitu dominan perdagangan dan jasa, kemudian memiliki peuntukan lahan yang mirip pada kawasan sekitar dalam rencana pola ruang (RTRW Kota) nya.
- c) Karakteristik aktivitas yang diamati adalah semua bentuk kegiatan yang dilakukan di ruang publik, meliputi aktivitas dinamis berupa pergerakan tanpa kendaraan bermotor seperti berjalan kaki atau bersepeda dan aktivirtas statis seperti berdiri dan duduk. Kemudian kedua jenis aktivitas ini juga dapat

dilakukan berkelompok (minimal 2 orang) dan juga sendiri (hanya 1 orang tanpa ada interaksi dengan orang lain.

- d) Pada proses pembahasannya, untuk analisis tingkat GPSI bahwa ukuran kota serta faktor sosial ekonomi kota dianggap tidak mempengaruhi (diabaikan) dengan maksud untuk lebih substantif saja pada fokus tingkat GPSI ruang publik.

1.6 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah berupa metode pengumpulan data dan juga metode analisis.

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

❖ Survei Primer

Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilapangan yaitu pada kawasan ruang publik yang menjadi objek amatan. Mengamati langsung berarti bahwa sekaligus melakukan perekaman data yang tepat untuk mendapatkan informasi perilaku yang sifatnya sangat dinamis, yang kemudian hasil dari pada perekaman tersebut akan dikompilasi dengan mempergunakan tabel survei serta peta pola aktivitas yang telah disediakan. Tentunya selain perlengkapan form dan peta survei diatas, diperlukan juga alat berupa kamera yang berguna memotret ataupun merekam kondisi mengenai situasi amatan.

Semua data yang dikumpulkan melalui survei ini yaitu tentunya memperhatikan kebutuhan data sesuai dengan metode analisis GPSI.

Pengumpulan data primer dilakukan pada hari senin sampai dengan sabtu dengan asumsi kegiatan harian warga dilaksanakan secara normal. Dan apabila ada kegiatan khusus warga yang dilaksanakan diruang amatan seperti acara pernikahan, kampanye, upacara, dan lain-lain maka, survei ditiadakan dan digantikan dengan hari lainnya.

❖ Survei Sekunder

Pengumpulan data mengenai survei sekunder dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat instansional terkait objek yang mengenai kawasan ruang publik amatan. Adapun data instansional yang paling

urgent yaitu tentang peta yang berkaitan dengan kawasan yang menjadi fokus amatan antara lain :

1. Peta administrasi Provinsi Sumatera Barat
2. Peta rencana struktur ruang Provinsi Sumatera Barat.
3. Peta administrasi Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto dan Kota Solok.
4. Peta Citra Satelit atau foto udara kawasan ruang publik yang menjadi fokus amatan (bila data ini tidak tersedia pada instansi, maka akan diupayak mencari dari sumber lain misalnya situs internet yang menyediakan unduh citra satelit atau foto udara kawasan tersebut).

1.6.2 Metode Analisis

Dalam tahap analisis, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan sesuai dengan yang dijelaskan pada bagian sasaran di atas antara lain :

- ❖ Mengidentifikasi dengan metode deskriptif kawasan ruang publik yang akan menjadi objek amatan/ studi berdasarkan kesamaan sifat letak dan karakteristik pemanfaatan ruang disekitarnya di 7 pusat kota-kota Provinsi Sumatera Barat. Pada bagian ini akan dijelaskan serta diuraikan beberap kesamaan sifat dari pada kawasan ruang publik yang akan menjadi fokus amatan di 7 kota tersebut sehingga bisa logis dalam penilaian tingkat efektifitasnya.
- ❖ Setelah ditetapkan 7 kawasan ruang publik yang akan menjadi fokus amatan, maka langkah selanjutnya adalah memetakan kawasan tersebut dengan bantuan data peta citra atau foto udara kawasan dengan teknik *remote sensing* (penginderaan jauh) dalam hal memudahkan pengambilan data dan juga pemetaan pola aktivitas pada saat survei dilakukan.
- ❖ Analisis *Good Public Space Index* yang dipopulerkan oleh Johannes Parlung pada tahun 2013. Analisis ini digunakan untuk menjelaskan tingkat efektifitas suatu ruang publik berdasarkan pendekatan terhadap aktivitas sosial dan karakteristik pengguna ruang publik sebagai fokus

amatan. Adapun beberapa variabel dan teknik pengukurannya yaitu sebagai berikut :

1. *Intensity of use (IU)*. Variabel ini dijelaskan oleh jumlah orang yang terlibat dalam aktivitas pada ruang luar. Bila diinterpretasikan untuk tingkat pencapaian yang semakin baik yaitu penggunaan ruang publik oleh pengguna ruang (masyarakat) sudah optimum penggunaannya dari segi jumlah pengunjung terhadap luas ruang publik yang tersedia.
2. *Intensity of social use (ISU)*. Variabel ini dijelaskan melalui keberadaan kelompok pengguna pada ruang luar. Kelompok terjadi saat ada sekurang-kurangnya dua orang terlibat dalam aktivitas yang sama. Bila diinterpretasikan untuk tingkat pencapaian yang semakin baik yaitu penggunaan ruang publiknya menunjukkan tingginya interaksi sosial yang terjadi antara pengguna ruang publik sehingga dapat dikatakan telah berhasil menjadi tempat yang menyediakan wadah atau tempat yang menjaga keberlangsungan interaksi sosial secara berkelompok.
3. *People's duration of stay (PDS)*. Variabel ini dijelaskan oleh durasi (lama) orang melaksanakan aktivitas pada ruang luar. Bila diinterpretasikan untuk tingkat pencapaian yang semakin baik yaitu ruang publik tersebut telah baik dan menyediakan tempat yang dapat menampung aktivitas pengguna ruang publik tanpa ada pembatasan waktu sehingga pengguna ruang publik bisa melakukan aktivitas dalam ruang publik dengan durasi waktu yang bebas (bisa dikatakan bersifat demokratis).
4. *Temporal diversity of use*. Variabel ini diukur berdasarkan sebaran aktivitas yang terjadi pada suatu kurun waktu amatan. Variabel ini diukur dengan mempergunakan metode *Simpson's Diversity Index*. Bila diinterpretasikan untuk tingkat pencapaian yang semakin baik yaitu pada jenis aktivitas pengguna ruang untuk setiap waktu amatan (pagi, siang, sore dan malam) tidak adanya dominansi waktu

yang berarti pada setiap waktu pun, masih terdapat pengguna ruang publik yang beraktivitas pada ruang publik tersebut.

5. *Variety of use*. Variabel ini diukur dari keberagaman aktivitas *Simpson's Diversity Index*. Bila diinterpretasikan untuk tingkat pencapaian yang semakin baik yaitu pada jenis atau ragam aktivitas pengguna ruang publik tidak adanya dominansi daripada intensitas salah satu jenis aktivitas saja, melainkan merata dan dilakukan dengan intensitas yang sama dan banyak pula.
6. *Diversity of users*. Variable ini diukur dari keberagaman karakteristik pengguna ruang luar. Variabel ini diukur dengan mempergunakan metode *Simpson's Diversity Index*. Bila diinterpretasikan untuk tingkat pencapaian yang semakin baik yaitu pada suatu ruang publik dinilai lebih demokratis karena dapat dinikmati oleh semua kalangan umur serta tidak menunjukkan adanya dominansi penggunaan ruang publik oleh kalangan tertentu.

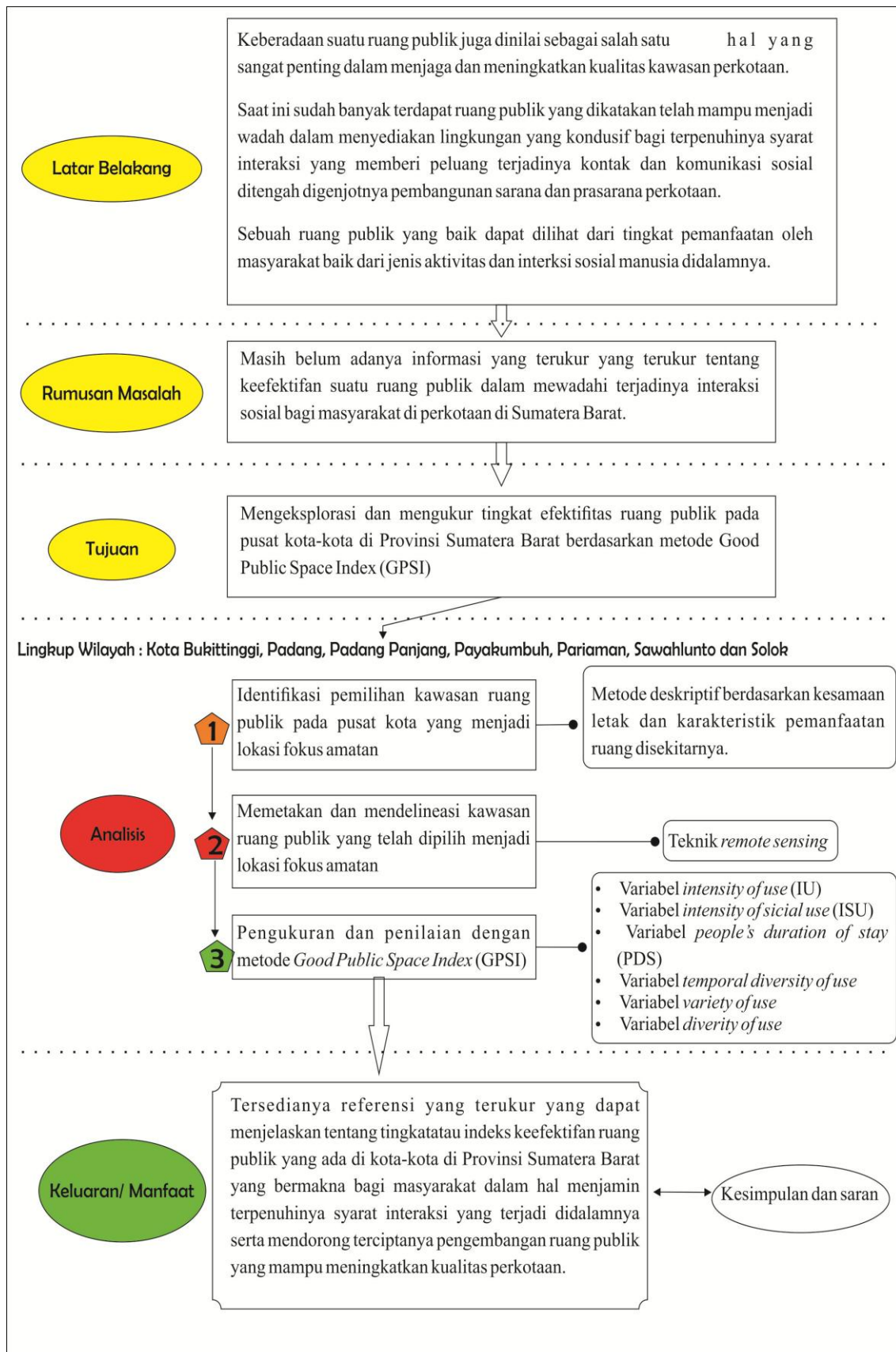
- ❖ Menginterpretasikan hasil dari pada penilaian variabel menurut metode GPSI. Nilai GPSI yang didapatkan diperoleh dari hasil penjumlahan nilai dari seluruh variabel diatas. Dengan menggunakan keenam variabel, dimana masing-masing variabel memiliki range nilai 0 – 1 dan juga memiliki interpretasi yang sama dimana nilai mendekati 1 bersifat positif, dengan demikian nilai minimum adalah '0' dan maksimum '1'.

Nilai mendekati '0' dapat diinterpretasikan bahwa segmen analisis memiliki nilai yang sangat rendah dalam hal pemanfaatan ruang luarnya. Hal ini dapat dibahas secara lebih detail dengan meninjau nilai dari setiap variabel penyusunnya, apakah kerendahan nilai ini disebabkan oleh rendahnya jumlah pengguna, rendahnya interaksi sosial, tidak lamanya durasi aktivitas, tidak beragamnya aktivitas atau adanya dominansi kelompok individu tertentu dalam pemanfaatan ruang. Sebaliknya, nilai GPSI yang mendekati '1' menunjukkan bahwa segmen analisis memiliki sifat demokratis yang lebih tinggi (dipergunakan oleh individu yang beragam), lebih responsif (mampu

menampung aktivitas yang beragam dan individu yang lebih banyak) sehingga lebih disukai oleh pengguna karena memiliki makna.

Untuk lebih jelasnya, hal-hal yang berhubungan dengan metode analisis ini, dideskripsikan pada bab literatur.

1.7 Kerangka Berpikir



1.8 Sistematika penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang studi, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, metodologi yang terdiri dari metode pengumpulan data dan metode analisis, kerangka berfikir serta sistematika penulisan.

BAB II STUDI LITERATUR

Bab ini berisikan studi literatur yang meliputi pedoman – pedoman, standar, teori maupun pendapat para ahli yang penulis gunakan dalam mendukung kajian dalam studi ini.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Bab ini berisikan gambaran umum wilayah makro kawasan studi yaitu tentang 7 kota dalam wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat. Serta kondisi wilayah studi mikro yaitu ruang publik amatan yang didapatkan dari hasil survei pendahuluan yang juga disertakan dengan penjelasan pemilihan lokasi tersebut sebagai objek amatan yang merupakan hasil dari analisis pemilihan lokasi dan interpretasi dari analisis menggunakan teknik *remote sensing*.

BAB III ANALISIS

Bab ini berisikan langkah-langkah dan hasil pembahasan, pengukuran serta interpretasi pada tingkat efektifitas ruang publik pada pusat kota-kota di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan indeks GPSI-nya dan juga menyatakan beberapa temuan studi yang didapatkan berdasarkan hasil analisis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan rekomendasi yang berhubungan dengan tingkat efektifitas ruang publik tersebut dalam hal mendorong terciptanya ruang publik yang mampu meningkatkan kualitas kawasan perkotaan secara maksimal.